

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, L (2017). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Serentak Kota Yogyakarta Tahun 2017*.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bramantyo, H. A (2016). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Kabupaten Sleman Tahun 2015*.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Cetakan I)*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions* . California: Sage Publication.
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlambang, A. P. (2017). *Peran KPU Kabupaten Klaten Dalam Peningkatan Partisipasi Penyandang Tuna Netra Dalam Pilkada Tahun 2015*. Skripsi UII Yogyakarta.
- Herlina, I. (2018). *Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017*. Skripsi UMY.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- <http://diy.kpu.go.id/web/2017/07/31/tantangan-pilkada-akses/>. (21 Desember 2018). *Tantangan Pilkada Akses*. Yogyakarta: diy.kpu.go.id.
- Khoiri, Y. (2014). *Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial UNY Yogyakarta.
- Lasida, I. G. (2017). *Membangun Pemilu Inklusif Untuk Disabilitas (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017)*. (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), 2.
- Maftuhin, A. (2016). *Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Disabilitas, dan Penyandang*. INKLUSI: Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2, h. 139-162.
- Merly, M. (2016). *Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Disabilitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta)*. Ketahanan Nasional, 61-77.

- Muslikhah, U. (2017). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum*. UIR Law Review.
- Nursyamsi, F., & Arifianty, E. D. (2017). *Aksesibilitas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas*. The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2(1), 3.
- Putra, A. A (2016). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 Di Kota Yogyakarta*.
- Putra, A. A., Efendi, D., Sanahdi, R., & Amriyanto, H. (2017). *Demokrasi dan Kesadaran Politik. Investigasi Disabilitas Menuju Partisipasi Politik dalam Pemilu Presiden 2014 di Yogyakarta, Indonesia. Dalam Konferensi Internasional ke-2 tentang Pembangunan Sosial dan Politik (ICOSOP 2017)*. Atlantis Press.
- Redley, M. (2008). *Citizens with learning disabilities and the right to vote*. Section of Developmental Psychiatry, University of Cambridge, UK, *Disability & Society*, 23:4, 375-384.
- Rights, E. U. (2014). *The right to political participation of persons with disabilities: human rights indicators*. Italy: Luxembourg : Publications Office of the European Union.
- Saputra, T. W. (2017). *Analisis Kinerja KPU Bantul Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015*. Skripsi UMY.
- Setya, A. D. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara)*.
- Sholahuddin, M. (2007). *Setting Ruang dan Pengaruhnya terhadap Aksesibilitas Para Penyandang Cacat Tubuh di Pusat Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta*. LINTAS RUANG: Jurnal Pengetahuan & Perancangan Desain Interior, 1(1).
- Suharto, S. (2016). *Disability terminology and the emergence of “diffability” in Indonesia*. *Disability & Society*, 31(5), 693–712.
- Surbakti, Ramlan, & Supriyanto, Didik. (2013). *Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*. Jakarta : Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013, tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (Convention on the Rights of Person with Disabilities) Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum